

BUDDHIST-NATIONALISM DAN PARADOKS PEMBENTUKAN IDENTITAS MULTIKULTURAL DI MYANMAR, THAILAND DAN KAMBOJA

Akhdiat Dimas Abimanyu¹

¹Program Studi Asia Tenggara, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,
 Jalan Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424

Email: akhdiat.dimas@ui.ac.id

Submitted: 26-04-2025; Accepted: 24-09-2025; Published :28-09-2025

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Buddhist-nationalism sebagai sebuah paradoks dalam konteks multikulturalisme di Asia Tenggara, khususnya di Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Buddhisme yang secara historis mengajarkan kedamaian dan keterpisahan dari politik, justru mengalami transformasi di era modern dengan integrasinya ke dalam instrument politik dan identitas nasional yang cenderung eksklusif. Dengan pendekatan kualitatif dan metode komparatif, penelitian ini menjelaskan bahwa di Myanmar dan Thailand, nasionalisme Buddhis sering berujung pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas, khususnya Muslim melalui diskriminasi narasi historis, politisasi agama dan integrasi negara dengan sangha. Sebaliknya di Kamboja, Buddhisme justru berfungsi sebagai kekuatan simbolik dan rekonsiliatif pasca trauma Khmer Merah, walau tetap ada peran politis dalam kelompok sanha di era kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun buddhisme berakar dari nilai-nilai inklusivitas, transformasinya menjadi nasionalisme agama telah menimbulkan paradoks dalam pembentukan identitas multicultural di Asia Tenggara.

Kata kunci: Nasionalisme Buddhis; multikulturalisme; Asia Tenggara; Identitas Nasional; Diskriminasi Agama

PENDAHULUAN

Buddhisme memegang peranan penting dalam membentuk sejarah dan identitas Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah. Buddhisme sebagai sebuah agama dan aliran filosofis merupakan hasil dari proses pencerahan Siddhartha Gautama yang hidup setidaknya 2.500 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, Buddhisme terus menyebar, tidak hanya di Asia Selatan dan Tenggara, namun juga ke Asia Timur, Eropa, dan benua Amerika. Salah satu ajaran yang paling banyak disebarluaskan dari apa yang didapatkan oleh Siddhartha Gautama adalah dhamma. Siddhartha Gautama sendiri menyebarkan ajaran *dhamma* (ajaran Buddha yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari penderitaan) selama setidaknya 45 tahun, mengunjungi banyak tempat sambil mengajarkan apa yang ia dapatkan sebagai sebuah pencerahan atau enlightenment. Buddhisme mengajarkan berbagai macam cara bagi pengikutnya untuk menyucikan diri dan tidak ada marginalisasi sosial

dalam bentuk kasta yang akhirnya menarik minat berjuta-juta orang untuk menjadi pengikut Sang Buddha (Gupta & Verma, 2021).

Buddhisme lahir sebagai sebuah reaksi atas fenomena sosial di India kuno yang sangat menitikberatkan pada sistem kasta. Ajaran Brahmanisme yang menekankan pada pemisahan kelas sosial atau dikenal dengan *varnas* menjadi pusat hierarki kehidupan masyarakat pada masa itu (Houtart, 1976). Ajaran Buddhisme secara perlahan berkembang menjadi sebuah alat politik identitas dalam melawan ketidakadilan dan kesenjangan etnis dan agama di tengah masyarakat India kuno pada masa itu (Sukmariningsih & Mashari, 2023). Orang-orang yang berasal dari kelompok kelas bawah merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi agama, etnis, dan kelompok sosial yang mendominasi roda politik dan kehidupan sosial, sehingga mereka mengadopsi ajaran Buddhisme sebagai alat untuk membebaskan diri dari kesengsaraan atas penindasan tersebut.

Berdasarkan sumber arkeologis, Buddhisme masuk dan menyebar ke Asia Tenggara setidaknya pada 3.500 SM melalui jalur perdagangan antara India dengan Asia Tenggara. Masuknya sistem keyakinan baru ini tidak mendapatkan perlawanan yang berarti dan tidak juga mendapatkan kesulitan dari orang-orang asli. Terjalannya hubungan dagang yang kuat antara dua wilayah ini memperkuat argumen bahwa peradaban Asia Tenggara adalah sama tuanya dengan Mesir, Yunani, India, dan Cina (Jha, 2016; Agrawal, 2015). Sejak masa awal perkembangannya, Buddhisme telah mempercayai pemahaman bahwa keharmonisan antar makhluk hidup dapat terjadi dengan cara tanpa kekerasan. Sebagai contoh, Buddhisme meyakini bahwa membantu orang lain bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kedamaian untuk diri sendiri (Gupta & Verna, 2021).

Ajaran Sidhartha Gautama yang menekankan pada pemisahan antara politik dengan agama guna mencapai kedamaian dan harmoni telah mengalami pergeseran dan bahkan terkesan tidak lagi secara murni diikuti oleh banyak pengikutnya. Di beberapa negara, baik di Asia Tenggara maupun Asia Selatan, Buddhisme telah memperkuat posisinya sebagai sebuah entitas penting dalam bagaimana negara bermanuver. Penyatuan konsep Buddhisme dengan nasionalisme menghasilkan sebuah paham baru yang dikenal dengan Nasionalisme Buddhisme yang menjadi sebuah anomali terhadap kehidupan multikulturalisme di Asia Tenggara (Chappus & Nourse, 2023). Di Myanmar, gerakan Nasionalisme Buddhis menjadi sebuah alat politik bagi penguasa, khususnya kekuatan junta militer. Di Thailand, nasionalisme Buddhis merupakan unsur tak terpisahkan dalam berjalannya proses kenegaraan Thailand dan dapat ditemukan di kelompok-kelompok liberal maupun konservatif karena telah menjadi DNA di tengah-tengah masyarakat (Tonsakulrungruang, 2021). Di Kamboja, walaupun sempat mengalami penekanan sistematis dari Khmer Merah di era Pol Pot, nasionalisme Buddhisme tetap memegang peranan penting dalam membentuk identitas nasional Kamboja tanpa menciptakan kekerasan sistematis yang dijumpai di Myanmar dan Thailand.

Melihat latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana semangat nasionalisme agama, dalam hal ini nasionalisme Buddhisme, menjadi sebuah

paradoks dalam pembentukan identitas multicultural di tiga negara, yaitu Thailand, Myanmar, dan Kamboja. Dalam meneliti fenomena ini, ada tiga pertanyaan penelitian yang akan memandu penelitian ini, yakni: pertama, bagaimana gerakan Buddhist-nationalism di Thailand, Myanmar, dan Kamboja memengaruhi proses pembangunan identitas nasional masing-masing negara; kedua, dalam konteks asimilasi dan multikulturalisme, apa saja anomali yang muncul akibat pengaruh Buddhist-nationalism terhadap kelompok minoritas di ketiga negara; ketiga, bagaimana perbandingan strategi dan dampak gerakan Buddhist-nationalism di Thailand, Myanmar, dan Kamboja dalam membentuk identitas nasional yang inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode komparatif. Penelitian komparatif adalah sebuah penelitian deskriptif yang berusaha mendapatkan jawaban secara mendasar sebuah hubungan sebab-akibat, dengan menganalisis variabel-variabel penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Dengan demikian, penelitian komparatif dapat diartikan sebagai sebuah penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan menemukan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah hal, seperti kebijakan, fenomena, dan lainnya (Agustien, 2023). Penelitian ini juga menggunakan metode studi Pustaka, yaitu pengumpulan informasi melalui kajian teori-teori dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian. Terdapat empat langkah dalam penelitian pustaka, yaitu mempersiapkan alat yang diperlukan, menyusun daftar referensi yang akan digunakan, mengatur durasi penelitian, serta membaca dan menulis materi penelitian. Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencari sumber-sumber dan merekonstruksi data dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, serta penelitian-penelitian yang sudah ada (Ultavia et.al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akar Nasionalisme Buddhisme di Asia Tenggara

Fenomena nasionalisme agama tidak hanya terjadi di Asia Tenggara, namun merupakan

sebuah fenomena global. Perpaduan antara Buddhisme dengan semangat nasionalisme lahir di era penjajahan barat dan terus menguat (International Crisis Group, 2017). Mengecualikan Thailand, seluruh negara di Asia Tenggara pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Barat. Supresi kolonial menjadi salah satu penyebab berkembangnya semangat nasionalisme yang etnosentris dan agamasentris, seperti nasionalisme Buddhisme. Pengaruh Inggris, misalnya, menciptakan sebuah jurang yang memisahkan kekuasaan pusat dari para Sangha (komunitas bhikku Buddha). Myanmar menjadi salah satu contoh kuat atas pemisahan ini. Dengan jatuhnya seluruh wilayah Burma ke tangan Inggris pada tahun 1885, monarki yang dianggap sebagai pelindung Buddhisme dan pengikutnya dianggap lenyap dan para bhikku menganggap bahwa ajaran sang Buddha telah mengalami kemunduran dengan hilangnya sosok pelindung (International Crisis Group, 2017). Antara dekade 1890 hingga 1920, banyak para penganut Buddhisme mendirikan Yayasan untuk menyelamatkan dispensasi yang tersisa dari era monarki sehingga budaya, bahasa, dan agama Burma tetap terjaga. Salah satu Yayasan yang paling berpengaruh adalah Young Men's Buddhist Association (YMBA) yang beranggotakan para pengikut Buddha berlatar belakang pendidikan barat (Foxeus, 2019).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintahan Inggris di Burma mengisi banyak posisi pemerintahan di Burma dengan para pendatang dari India, termasuk orang-orang muslim beretnis Rohingya walaupun mereka pun juga sudah ada di Burma sebelum kedatangan Inggris (Chappus & Nourse, 2023). Kebijakan itu membuat birokrasi Burma diisi oleh para Muslim dan Hindu dari India dan mengesampingkan posisi para elit lokal. Tidak hanya untuk mengisi birokrasi politik, para imigran India yang memiliki modal dan bisnis juga berdatangan ke Burma dan mendominasi sektor ekonomi. Mereka menguasai berhektar-hektar tanah, termasuk di dataran rendah Burma yang subur yang menyebabkan banyak para petani lokal tidak bisa Bertani dan membebaskan diri dari belenggu kesulitan ekonomi. Konflik berdasarkan ekonomi dan kekuasaan antara penduduk lokal dengan imigran India terjadi pada tahun 1930 dan 1938. Tahun 1938 menjadi salah satu konflik yang paling membekas. Konflik ini bermula dengan terbitnya sebuah buku yang dirilis oleh seorang muslim India yang dianggap menyinggung para penganut Buddhisme di Burma. Terjadilah demonstrasi yang

tidak hanya diikuti oleh masyarakat sipil, namun juga para bhikku yang menginginkan sang penulis untuk dihukum. Mereka mengancam jika hukum tidak ditegakkan maka para pengikut Buddha akan memperlakukan muslim sebagai musuh nomor satu mereka dan menyingkirkan mereka dari tanah Burma (International Crisis Group, 2017). Mereka juga melakukan pembakaran terhadap toko-toko muslim dan beberapa muslim pun terbunuh akibat fitnah yang menyebar yang mengatakan bahwa penduduk muslim Burma akan merobohkan dua pagoda suci, yaitu Pagoda Sule dan Shwedagon. Demonstrasi ini berakhir dengan penangkapan setidaknya 4.000 orang, termasuk para bhikku yang dituduh melakukan tindakan kekerasan dan pembunuhan kepada kelompok Muslim yang sempat mengalami pefitnahan oleh kelompok Buddha (Steinberg, 1997).

Berbeda dengan Myanmar yang memiliki akar dari penjajahan, akar Nasionalisme Buddhisme Thailand tidak dipengaruhi secara langsung oleh kolonialisme. Pada akhir abad ke-19, dataran utama Asia Tenggara dikuasai oleh kekuatan besar, yaitu Inggris di Burma dan Perancis di Indo-Cina (Laos, Kamboja, dan Vietnam). Thailand, yang saat itu bernama Siam berada di dalam dilemma dan mendorong terciptanya semangat untuk menunjukkan nasionalisme yang modern di antara dua kekuatan Eropa. Namun, Siam melakukan upaya modernitas dengan caranya sendiri. Kekuatan royalis dan institusi monarki memegang peranan penting dalam pembentukan semangat nasionalisme Siam. Para elit bangsawan menjadi garda terdepan dalam membina proses transformasi Siam menjadi negara modern, sehingga banyak yang menyebut nasionalisme Thailand atau Siam adalah nasionalisme royalis. Hal ini diperkuat dengan keadaan dimana hanya Siam/Thailand yang 'aman' dari berbagai macam kekacauan yang terjadi di Asia Tenggara pada masa itu, seperti kolonialisasi Barat, keruntuhan Burma oleh Inggris, naiknya popularitas ideologi komunis, dan masalah ekonomi. Raja, yang dianggap sebagai sosok sempurna pengikut Buddha dan pelindung agama selamat dan aman dari berbagai macam kekacauan ini (Tonsakulrungruang, 2021).

Buddhisme menjadi akar dari proses modernisasi Siam yang lalu bertransformasi menjadi Thailand. Namun, proses modernisasi ini tidak diikuti oleh sekularisasi sehingga Buddhisme masih memegang peranan yang cukup kuat dalam proses transisi dan pembentukan identitas Thailand. Buddhisme melihat monarki dan Buddhisme adalah

dua bagian yang tidak terpisahkan. Raja dianggap sebagai pelindung bagi Sangha di Thailand. Sebagai balasan, para bhikku akan memberikan berkat dari para bhikku dan berkat ini dilihat sebagai sebuah bentuk legitimasi kekuasaan sang raja. Konsep ini ada di dalam ajaran dhamma dimana raja tidak hanya bertanggung jawab kepada dunia yang fana, namun juga dunia spiritual. Konsep ini dikenal dengan konsep 'Dua Roda Dhamma'. Jika sang raja dianggap gagal dalam menjalankan tugas ini, maka sang raja wajib digantikan oleh sosok yang lebih saleh. Hal inilah yang menjadikan raja Thailand berada di posisi tertinggi dalam hierarki politik Thailand (Tonsakulrungruang, 2021).

Tiga raja Thailand menjadi garda terdepan dalam mengintegrasikan Buddhisme dengan semangat nasionalisme Thailand. Raja Mongkut, yang bertahta dari tahun 1851 hingga 1868, melakukan proses rasionalisasi Buddhisme dengan mengesampingkan unsur mitologi mistis dan mengedepankan unsur factual dan logis dalam Buddhisme (Jory, 2002). Raja Chulalongkorn, yang bertahta dari tahun 1868 hingga 1910 juga melakukan tindakan yang sama dengan ayahnya. Ia mendirikan Dewan Sangha untuk menjadi wadah bagi para Sangha, khususnya dalam proses mengintegrasikan sekte Buddhisme Yuan Utara Thailand dan sekte Timur Laut Thailand yang banyak diisi oleh para bhikku yang menetap di hutan dan hidup sederhana seperti Buddha Gautama (Easum, 2013). Terakhir, Raja Vajiravudh yang bertahta dari tahun 1910 hingga 1925, menciptakan sebuah ideologi baru dalam proses Thaifikasi yang dibagi menjadi tiga fondasi utama, yakni negara, agama (Buddhisme), dan raja. Vajiravudh menetapkan Thailand sebagai negara yang berlandaskan Buddhisme dan memasukkan symbol Buddhism eke dalam bendera nasional Thailand dengan warna putih (Keyes, 2016).

Kebijakan-kebijakan ini meninggalkan kesan yang mendalam dalam pola pikir masyarakat Thailand. Reformasi Buddhis pada masa Raja Mongkut, Chulalongkorn, dan Vajiravudh merupakan contoh paling menonjol dari narasi kerajaan-nasionalistik sekaligus perwujudan ideal tradisional tentang kepemimpinan Buddhis. Reformasi ini menegaskan kembali keyakinan bahwa kelangsungan agama Buddha hanya dapat terjamin melalui naungan dan perlindungan penguasa, bukan melalui pemisahan antara dua ranah tersebut. Ketika sistem monarki absolut dihapuskan pasca revolusi tahun 1932, para

pemimpin sipil dan militer tetap mempertahankan konsep tersebut. Para pemimpin politik Thailand dianggap memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan agama Buddha. Setiap kali wacana reformasi sangha muncul, rujukan yang digunakan adalah ideal "Dua Roda Dhamma" yang bertujuan mempererat hubungan antara negara dan agama, bukan menjauhkannya (Tonsakulrungruang, 2021).

Kamboja, walaupun terkesan tidak memiliki akar pada Buddhisme dalam membentuk identitas nasional dan multikulturalnya, sebenarnya tetap memiliki pengaruh yang kuat dari Buddhisme. Luka mendalam yang diakibatkan oleh sejarah Khmer Merah di Pol Pot sebenarnya juga memiliki agar pada semangat reformis Buddhisme. Pada tahun 1930, dibentuk sebuah institusi Buddhis yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh Thailand dalam komunitas Sangha Kamboja. Mereka menginginkan Kamboja memiliki identitas sanghanya sendiri. Beberapa orang direkrut ke dalam institusi ini, termasuk Pol Pot. Pol Pot lalu membentuk sebuah partai yang dikenal dengan Angkar. Pol Pot menyebutnya hanya sebagai sebuah organisasi belaka dan memiliki konsep pemikiran yang sama dengan Sangha, khususnya dalam hal kesadaran berfikir. Dikarenakan adanya 'kesamaan' ini, tidak banyak yang mengira bahwa Pol Pot dan Khmer Merah akan melakukan tindakan kejam saat mereka mengambil alih Kamboja pada 1975. Mereka menghapus Sangha dan memaksa para bhikku untuk membuka kain pakaian mereka. Mereka dikirim untuk diredoktrinasi dan berakhir dengan pembantaian. Banyak vihara diruntuhkan atau dialihfungsikan sebagai gudang, penjara, atau pusat doktrinisasi. Mereka yang selamat melarikan diri ke Vietnam hingga Vietnam bisa membantu menggulingkan kekuasaan Khmer Merah dan melakukan restorasi citra Buddhisme (Keyes, 2016).

Buddhist-nationalism sebagai sebuah Paradoks

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Buddhisme sering diintegrasikan dengan kekuatan politik dan nasionalisme oleh para tokoh nasionalis guna menciptakan sebuah legitimasi. Berkembangnya tensi antara berbagai macam etnik grup dan kelompok beragama telah menjadi tantangan besar dalam mempertahankan multikulturalisme Asia Tenggara. Impelementasi hukum umum atas masalah ini tentunya bukan menjadi solusi, dikarenakan perbedaan pandangan dan budaya dari beberapa negara yang berkonflik, seperti Myanmar dan Thailand (Gupta & Verma,

2021). Dalam bagian ini, penulis akan membahas bagaimana Nasionalisme Buddhis menjadi sebuah anomali di tiga negara subjek penelitian, yaitu Myanmar, Thailand, dan Kamboja.

Myanmar

Pada tahun 2011, Myanmar melakukan transisi politik setelah kemenangan partai yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi dan mendorong liberalisasi demokrasi, implementasi ekonomi yang lebih terbuka, dan rekonsiliasi (Marshall, 2011). Penghapusan kekuatan militer, mendorong keterbukaan berpendapat yang belum pernah terjadi sebelumnya, khususnya dalam pemanfaatan sosial media dan internet. Namun hal ini berorientasi kepada hal yang lebih buruk, yaitu sentiment anti-Muslim ditumbuhkan melalui penyebaran berita-berita palsu tentang etnis Muslim di Myanmar, seperti Rohingnya dan konflik antara para pengikut Buddhisme dengan Muslim pun terjadi di Negara Bagian Rakhine pada tahun 2012 (International Crisis Group, 2017; Foxeus, 2019). Pembatalan kebijakan sensor terhadap publikasi pada tahun 2012 dan 2013 membuka ruang bagi kemunculan berbagai surat kabar, jurnal, dan buku baru. Di saat yang bersamaan, transformasi di sektor telekomunikasi memungkinkan mayoritas masyarakat memperoleh akses terhadap ponsel dan internet, yang turut mendorong peningkatan penggunaan media sosial, terutama Facebook. Dalam kurun waktu 2012 hingga 2015, para biksu nasionalis secara leluasa menyebarkan pandangan yang oleh sejumlah pengamat dianggap sebagai bentuk ujaran kebencian (*amoun-sagā*), tanpa adanya intervensi dari otoritas negara (Min Zin, 2015).

Dalam gerakan Nasionalistik Buddhis di Myanmar, ada dua poin utama yang selalu disuarakan: pertama, melindungi segala apapun yang berkaitan dengan kebuddhaan dalam institusi negara; kedua, memperkuat pertahanan dalam melawan ancaman dari Muslim. Ada sebuah konspirasi teori yang disebarluaskan dalam agenda ini yang menyebutkan bahwa kelompok minoritas Muslim di Myanmar memiliki tujuan menghancurkan Buddhisme dan mengambil alih Myanmar di abad ke-21 melalui proses pernikahan, pengambil alihan sektor ekonomi, dan kekuatan politik sehingga menciptakan propaganda bahwa Muslim adalah tokoh antagonis dalam konflik ini. Dalam konspirasi ini pula, diberikan beberapa contoh bagaimana Muslim menguasai negara-negara yang dulunya dikuasai oleh Buddhisme,

seperti Malaysia, India, Indonesia, dan Pakistan. Para tokoh utama Buddhisme yang tergabung ke dalam beberapa pergerakan, seperti Ma Ba Tha dan Gerakan 969 mempromosikan sebuah rencana besar dalam melawan Muslim, yaitu mengajak masyarakat Myanmar untuk menikah hanya dengan yang memiliki kesamaan ras dan agama, mengajarkan Buddhisme dan moralitas kepada anak-anak agar mereka tidak 'dimakan' oleh paham lain (dalam hal ini Islam), hanya membeli barang-barang dari orang-orang yang memiliki ras dan agama yang sama, dan hanya boleh memilih orang-orang yang beragama Buddha untuk duduk di kursi pemerintahan (Foxeus, 2019).

Gerakan nasionalis Buddhis di Myanmar tidak hanya berorientasi pada sentiment negative terhadap komunitas muslim, namun juga mengembangkan orientasi anti-India atau orang-orang yang dianggap imigran dari India atau Sri Lanka. Sentiment ini lahir sejak masa colonial Inggris dengan banyaknya imigran India yang didatangkan oleh Inggris untuk menduduki kursi pemerintahan dan menyebabkan para elit lokal dan tokoh agama (dalam hal ini bhikku) untuk menunjukkan superioritas mereka di antara para imigran. Pada tahun 1910, YMBA membuat propaganda dari jurnal yang mereka rilis dimana bila para imigran India dan Cina terus berdatangan ke Burma dan menyingkirkan ajaran Buddhisme, maka Myanmar (Burma) hanya akan menjadi sebuah legenda. Sentimen anti-India dan anti-Muslim ini lantas diadopsi oleh dua gerakan nasionalistik Buddhis terbesar di Myanmar, yaitu Ma Ba Tha dan Gerakan 969. Gerakan 969 yang berfilosofikan tiga pilar utama, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha), mempromosikan gerakan boikot terhadap para pebisnis muslim dan hanya memperbolehkan para pengikutnya untuk menikah dengan sesama Buddhis. Selain itu, mereka juga memprakarsai pendirian Sekolah Minggu Dhamma untuk anak-anak dan membuat lagu-lagu yang berisikan propaganda dan ajaran Buddha (Foxeus, 2019). Gerakan 969 lalu bertransformasi menjadi gerakan Ma Ba Tha yang berkembang tidak hanya sebagai sebuah gerakan atau organisasi, namun juga sebagai gerakan politik dan menanamkan ideologinya ke seluruh negeri dengan membangun cabang-cabang. Mereka pun menambahkan ideologi 969 dengan agenda politis dimana mewajibkan para penganut Buddhisme untuk memilih politisi-politisi yang beragama Buddhisme.

Negara bagian Rakhine telah menjadi pusat konflik akibat gerakan nasionalistik Buddhis di

Myanmar. Tidak hanya menjadi rumah bagi komunitas muslim di Myanmar, Rakhine juga menjadi sebuah gerbang masuk yang dalam propaganda nasionalistik Buddhist dapat menjadikan Myanmar dan bahkan Asia Tenggara sebagai daerah muslim. Komunitas muslim di Rakhine terus mengalami segregasi dimana suara mereka dalam pemilu 2015 pun dianggap tidak sah. Agenda anti-Muslim berubah menjadi anti-Rakhine karena kelompok minoritas di Rakhine yang tidak beragama Islam, seperti komunitas Kaman juga menjadi target propaganda (International Crisis Group, 2017). Banyak nasionalis religius mengandalkan beragam insiden berskala lokal—seperti sengketa lahan, penyembelihan hewan, atau kekerasan dalam rumah tangga—serta peristiwa-peristiwa besar seperti pemerkosaan dan pembunuhan brutal terhadap seorang perempuan Muslim oleh pria Muslim di negara bagian Rakhine pada 2012, sebagai dasar untuk membenarkan pandangan mereka.

Narasi bahwa Islam merupakan ancaman terhadap Buddhisme di kawasan tersebut secara konsisten muncul dalam wacana nasionalisme keagamaan di Myanmar. Tindakan penghancuran patung Buddha Bamiyan oleh Taliban di Afghanistan pada tahun 2001 sering dijadikan simbol kekerasan dan intoleransi yang diasosiasikan dengan Islam; serangan Taliban tahun 2007 terhadap situs-situs peninggalan Buddha dan lingkungan universitas kuno di Pakistan juga kerap dirujuk dalam konteks serupa. Pandangan bahwa Buddhisme adalah agama yang damai, tidak bersifat misionaris, dan oleh karena itu mudah menjadi korban penindasan oleh agama-agama yang dianggap lebih agresif, merupakan tema sentral dalam diskursus ini. Kecurigaan terhadap Islam semakin diperkuat oleh anggapan bahwa komunitas Muslim cenderung memberlakukan hukum Islam setelah mencapai dominasi demografis, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Buddha yang meyakini bahwa toleransi mereka justru telah dimanfaatkan secara negatif. Persepsi bahwa Islam secara inheren bersifat kekerasan menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya nasionalisme Buddha kontemporer di Myanmar. Bahkan di wilayah terpencil seperti Loikaw, ibu kota negara bagian Kayah, generasi muda menunjukkan gambar-gambar kekejaman ISIS melalui ponsel mereka sebagai bentuk visualisasi ketakutan, terutama terkait ketidakpuasan terhadap pemerintahan Liga Nasional untuk

Demokrasi (NLD) yang dianggap gagal merespons ancaman Muslim yang mereka rasakan (International Crisis Group, 2017).

Thailand

Tidak jauh berbeda dengan Myanmar, Thailand juga telah mengalami peningkatan jumlah kasus ekstrimisme Buddhis yang diyakini sebagai hasil dari doktrinisasi selama bertahun-tahun lamanya dan keadaan politik Thailand yang terus mengalami dinamika. Banyak anggota dari komunitas Sangha di Thailand dan para penganutnya melakukan tindak kekerasan (paling banyak dari sisi verbal) kepada kelompok minoritas (Tonsakulrungruang, 2021).

Nasionalisme Buddhis di Thailand telah dibentuk sejak masa Raja Mongkut hingga Vajiravudh yang telah dijelaskan di bagian pendahuluan. Memasuki era pasca perang dunia kedua, Thailand menjadi salah satu negara yang berhasil menyelamatkan diri dari ancaman komunisme. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran para militant nasionalis Buddhis yang menyebarkan propaganda bahwa membunuh para penganut komunisme bukanlah tindakan berdosa. Salah satu bhikku yang mendukung hal ini adalah Kittivuddho Bhikku. Pada masa itu, demonstrasi besar-besaran menuntut dictator militer Prapas Charusathien dan Thanom Kittchakorn untuk diasingkan, menciptakan sebuah efek domino yang pada akhirnya membuat banyak mahasiswa dan rakyat melihat komunisme sebagai wadah untuk mewujudkan tujuan itu. Kejadian ini menciptakan sebuah ‘perang saudara’ antara mahasiswa, public, dan pemerintahan militer yang mendapatkan legitimasi dari Sangha (Keyes, 2016). Konflik ini berakhir dengan supresi militer dari pemimpin Junta dan banyak mahasiswa yang dibunuh dan hilang.

Pada dekade 1990-an, demonstrasi lain terjadi untuk menuntut Raja Bhumibol Adulyadej untuk menekan pemerintah agar Thailand menjadi inklusif. Hal ini berkaitan erat dengan perluasan makna satsana, yang memiliki arti ‘agama’ yang pada saat itu hanya dikaitkan dengan Buddhisme. Demontran menginginkan agar para penganut kepercayaan lain, seperti Muslim dan Kristen juga dapat dikategorisasikan dalam payung satsana dan mendapatkan kewarganegaraan yang sah di mata hukum dan di dalam tiga pilar Thailand: monarki, satsana (agama), dan ke-Thai-an. Tuntutan ini juga memberikan hak yang lebih luas kepada masyarakat Muslim di Selatan Thailand untuk bisa dianggap

sebagai bagian dari Thailand dan identitas Thai walau berbeda keyakinan. Pada tahun 1997, konstitusi paling liberal disahkan di Thailand yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Thailand yang lebih inklusif (Tonsakulrungruang, 2021). Sebuah konstitusi yang dicanangkan oleh para bhikku untuk menjadikan Buddhisme sebagai agama negara ditolak. Hal ini menciptakan disintegrasi antara penganut Buddhis tradisional dengan yang lebih berorientasi dengan politik, sehingga anomaly pun terjadi dan menciptakan gangguan terhadap konsep kemasyarakatan Thailand yang bersatu (Keyes, 2016).

Sejak tahun 2005, upaya untuk menjadikan Buddhisme sebagai agama nasional terus bergulir. Didorong oleh konflik yang berlangsung di Thailand selatan antara kelompok pemberontak Muslim dan pemerintah pusat—serta meningkatnya ketegangan antara komunitas Muslim Thailand dan penganut Buddha—disertai dengan perpecahan internal dalam kalangan monastik, upaya ini menyerukan penguatan hubungan antara institusi keagamaan (sangha) dan otoritas politik negara yang bertujuan memperkuat peran sangha sebagai mitra negara, dimana sejak 1970-an telah mengalami penurunan peran dan fungsi akibat modernisasi. Namun, hal ini justru berdampak pada meningkatnya keterasingan antara hierarki Buddha dan komunitas lokal, khususnya di Selatan Thailand, seperti Yala dan Pattani (Dubus, 2018). Salah satu konflik yang pernah terjadi antara otoritas muslim Pattani dengan Sangha adalah pembangunan Taman Buddha yang berlokasi di Pattani seluas 16 hektar. Walaupun mendapat penolakan dari masyarakat, pembangunan taman ini tetap dijalankan.

Konflik antara komunitas Muslim dan kelompok Buddhis nasionalistik menciptakan sebuah pertikaian berdarah antar dua kelompok agama, apalagi sejak pendekatan yang cukup kontroversial yang dilakukan oleh Thaksin Sinawatra. Akibatnya, pada tahun 2004, terjadi tragedy berdarah dimana setidaknya 23 bhikku dibunuh oleh komunitas muslim pemberontak di Selatan. Para bhikku berperan sebagai simbol dan sekaligus saluran yang mempertemukan dimensi keagamaan dan nasionalisme secara signifikan. Setiap tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bhikku di wilayah selatan, sekalipun tidak terkait secara langsung dengan gerakan pemberontakan, tidak hanya dipahami sebagai peristiwa lokal, melainkan juga diintegrasikan ke dalam narasi negara mengenai konflik yang berkepanjangan antara kelompok

separatis Muslim dan negara yang mayoritas beragama Buddha. Dengan demikian, setiap kasus tersebut pada akhirnya diinterpretasikan sebagai bagian dari konflik berbasis agama. Banyak vihara yang dimiliterisasi untuk melindungi para bhikku dan para penganut Buddhisme di Selatan. Bahkan, bhikku militer juga digerakan (Dubus, 2018).

Pada tahun 2015, beberapa bhikku di luar Selatan Thailand berusaha untuk memperkuat upaya penekanan sistematis dan rasial kepada komunitas muslim di Thailand. Seorang bhikku bernama Maha Aphichat dari vihara Mahanikai Wat Benchamabophit di Bangkok yang menulis di laman Facebook mengajak setiap penganut Buddhisme untuk membakar masjid-masjid yang ada di selatan dengan jumlah yang sama dengan para bhikku yang dibunuh. Walaupun tulisannya akhirnya dihapus atas tekanan dari pemerintah pusat, hal ini menunjukkan sebuah justifikasi di dalam anggota Sangha: bila Buddhisme diserang, maka penggunaan kekerasan dianggap sebagai pertahanan. Selain itu, beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Thailand juga menciptakan kondisi yang tak mengenakan bagi komunitas muslim di Selatan, seperti pendirian Or Bor Bor, yaitu gerakan militant Buddhis berbasis relawan dibawah Ratu Sirikit, istri dari Raja Bhumibol Adulyadej. Ada doktrin anti-Muslim yang diselipkan dimana Latihan militer mereka tidak hanya untuk melindungi desa, namun juga mempersiapkan diri bila ada serangan dari kaum Muslim (McCargo, 2009).

Setiap Thailand melakukan pergantian konstitusi, unsur penekanan untuk menjadikan Buddhisme sebagai asas yang harus dilindungi dan menjadikan Buddhisme sebagai agama nasional selalu dilakukan, walau selalu berakhir dengan kegagalan. Misalnya, pada tahun 2007, para tokoh radikal Buddhisme memasukkan diksi: “Negara harus menjadi pelindung bagi Buddhisme yang mayoritas rakyat Thailand telah ikuti sejak lama”, menekankan upaya legitimasi historis dan sosial dalam konstitusi. Bagi mereka, ini adalah sebuah konsesi dalam proses lobbying yang dilakukan karena penolakan untuk menjadikan Buddhisme sebagai agama nasional (Dubus, 2018). Pada tahun 2016, tokoh-tokoh radikal Buddhis kembali melakukan hal yang sama namun dengan cara lebih radikal. Mereka menulis dalam pasal 67:

“Dengan tujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi ajaran Buddha, yang telah lama dianut oleh mayoritas rakyat Thailand, negara harus mempromosikan dan mendukung pendidikan dan

penyebaran prinsip-prinsip ajaran Buddha Theravāda untuk tujuan pengembangan mental dan intelektual, dan harus menetapkan langkah-langkah dan mekanisme untuk mencegah penodaan ajaran Buddha dalam bentuk apa pun. Negara juga harus mendorong partisipasi semua umat Buddha dalam penerapan langkah-langkah dan mekanisme tersebut.”

Seruan konstitusional kepada umat Buddha untuk berpartisipasi dalam perlindungan agama Buddha dan pencegahan terhadap segala bentuk penodaan agama ini secara wajar menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan penganut agama lain di Thailand, khususnya komunitas Muslim di wilayah selatan. Dalam konteks ini, agama Buddha secara eksplisit ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan agama-agama lainnya. Ketidaknyamanan tersebut tercermin, antara lain, dari tingginya angka penolakan terhadap rancangan piagam konstitusi dalam referendum yang digelar pada 7 Agustus 2016 di provinsi-provinsi selatan, serta banyaknya surat suara yang dirusak atau tidak sah. Rancangan Pasal 67 bahkan menghapus sepenuhnya seruan yang sebelumnya selalu dimuat dalam konstitusi mengenai pentingnya “kerukunan antaragama.” Setelah menganalisis hasil referendum, pemerintah militer menyadari adanya indikasi kuat ketidakpuasan yang meningkat di kalangan komunitas Muslim, yang berpotensi memperburuk situasi sosial-politik. Sebagai respons terhadap hal ini, pada 22 Agustus 2016—hanya dua pekan setelah referendum—Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mengeluarkan perintah berdasarkan Pasal 44 dari piagam sementara, yang memberikan kewenangan penuh demi kepentingan keamanan nasional. Langkah ini dimaksudkan untuk mengoreksi dampak negatif dari isi rancangan Pasal 67 dan meredam potensi ketegangan antaragama yang lebih luas (Dubus, 2018).

Kamboja

Berbeda dengan dua negara yang sudah dibahas sebelumnya, Kamboja tidak memiliki kasus dimana nasionalisme Buddhisme menjadi sebuah paradoks dalam pembentukan identitas nasional mereka. Buddhisme memegang peranan penting dalam membentuk identitas Kamboja melalui sistem persaudaraan para bhikku (sangha) dan ajaran dhamma. Sangha memiliki peran dalam memberikan legitimasi terhadap pemimpin politik Kamboja, namun tidak secara langsung menyeter kegiatan politik dan hanya akan melakukan

intervensi bila sang pemimpin telah menyalahi ajaran dan norma Buddhisme. Semangat Buddhisme Kamboja sering disebut dengan Khmer Buddhisme dan menjadi salah satu alat politik yang memiliki posisi penting, walau signifikansinya masih dalam proses penyembuhan dari luka lama era Khmer Merah dan Pol Pot (Kent, 2024).

Pada era Khmer Merah di bawah komando Pol Pot, Khmer Buddhisme mengalami ‘kematian’. Pada tahun 1978, Yun Yat, Menteri Kebudayaan, Informasi, dan Propaganda dibawah Khmer Merah mendeklarasikan bahwa Buddhisme telah mati di Kamboja dan Kamboja akan membuat dasar filosofis dan budaya revolusioner yang baru. Raja Sihanouk ditempatkan sebagai tahanan rumah dan banyak dari bhikku anggota sangha dieksekusi. Kamboja secara praktis kehilangan dua symbol kebudayaan mereka, yaitu raja dan sangha (Kent, 2024). Saat Vietnam melakukan intervensi dengan mendirikan Republik Rakyat Kamboja (PRK) pada tahun 1979. Melalui PRK, Vietnam berusaha untuk merestorasi posisi sangha sebagai salah satu agenda politiknya. Ada tujuh tokoh bhikku yang dikembalikan gelar bhikkunya dan menjadi figure restorasi sangha di Kamboja. Melalui PRK, sangha secara perlahan mengembalikan unsur kebudayaan Buddhisme di tengah masyarakat Kamboja, seperti pernikahan, pemakaman, dan upacara keagamaan Buddhisme diperbolehkan untuk dilakukan. Namun posisi sangha masih sangat diawasi agar tidak berkembang sebagai kekuatan politik yang memberontak kepada Khmer Merah maupun Vietnam (Keyes, 2022).

Saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, bantuan yang Soviet berikan kepada negara-negara sekutunya, seperti Vietnam terputus. Akibatnya, Vietnam secara perlahan melepaskan cengkramannya terhadap Kamboja dan Perjanjian Paris ditanda tangani pada tahun 1991 (Ashley, 1998). Dengan keluarnya Vietnam dari Kamboja, kebangkitan Khmer Buddhisme pun terjadi. Salah satu kebangkitan yang dilakukan oleh Kamboja adalah mengembalikan kerajaan sebagai symbol persatuan dan agama dan menciptakan tiga pilar utama dalam pemerintahan Kamboja yang baru yang terdiri atas negara (cheat), agama (sasana), dan raja (mohaksatr). Perjanjian Paris 1991 memberikan Kamboja kesempatan untuk menjadi negara multipartai. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pengawasan di Kamboja dari tahun 1991 hingga 1993 untuk memastikan demokrasi benar-benar diimplementasikan. Terjadi konflik antara

partai yang dipimpin oleh Hun Sen dengan partai yang dipimpin oleh Pangeran Ranariddh. Namun, Raja Sihanouk melakukan kompromi agar adanya pembagian kekuasaan antara kedua partai yang menciptakan keraguan dengan demokrasi di Kamboja (Kent, 2024).

Konstitusi baru tahun 1993, yang memuat hak pilih universal bagi orang dewasa, juga memasukkan para bhikkhu sebagai pemilih dalam sistem demokrasi multipartai. Keputusan ini diambil oleh kepala UNTAC (Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja), bertentangan dengan permintaan tegas dari para pemimpin kedua ordo monastik Kamboja, Patriark Agung Tep Vong dan Bour Kry, yang menginginkan agar bhikku dikecualikan dari hak pilih. Penolakan UNTAC ini mengakibatkan para bhikku untuk pertama kalinya dalam sejarah diikutsertakan sebagai bagian dari pemilih Kamboja. Konstitusi Kamboja menjadi salah satu dari sedikit konstitusi di dunia yang mengakui Theravada sebagai agama negara—namun tidak menyertakan pengecualian agama terhadap hak pilih universal bagi para anggota monastiknya. Seiring semakin terintegrasinya negara ke dalam pasar global, instrumen kekuasaan yang paling signifikan beralih dari persenjataan menjadi kepemilikan properti dan modal. Sangha pun semakin termonetisasi seiring dengan membanjirnya organisasi non-pemerintah (NGO) internasional yang mencoba melibatkan para bhikku dalam proyek-proyek pembangunan yang disponsori pihak asing, serta karena para politisi mulai memberikan sumbangan dana besar kepada para bhikku, sehingga mereka kemudian merasa berkewajiban untuk menunjukkan loyalitas kepada para patron mereka (Kent, 2024).

Pada era 1990-an, banyak pria muda yang berasal dari daerah pedesaan dan terpinggirkan memilih untuk menjalani kehidupan monastik demi memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan. Fenomena ini turut memperlebar jurang kepercayaan antara para anggota sangha yang berasal dari kalangan ekonomi rendah dengan kelompok elite yang semakin berkembang. Di sisi lain, kondisi tersebut juga meningkatkan kerentanan para bhikku terhadap pengaruh dan tekanan dari para donatur yang memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar. Sebagian anggota sangha menyesuaikan diri—dengan tingkat kesadaran yang beragam—terhadap dinamika baru ini, sementara yang lain yang menentang dan dianggap membahayakan stabilitas oleh pihak elite menghadapi berbagai tindakan represif, mulai dari

pengusiran dari lingkungan vihara hingga intimidasi dan tindakan kekerasan. Selain itu, proses politisasi di kalangan kepemimpinan sangha semakin terlihat nyata. Pasca pemilihan umum tahun 1998, para bhikku turut serta dalam demonstrasi yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik pemilu. Munculnya aksi protes yang melibatkan para anggota sangha ini mengejutkan publik Kamboja, terutama ketika aparat keamanan menunjukkan kesiapan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap para bhikku yang berperan aktif dalam aksi demonstrasi tersebut (Kent, 2024).

Di abad ke-21, Khmer Buddhisme memegang peranan penting dalam menggerakkan massa untuk memprotes ketidakpuasan atau adanya tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat Kamboja. Pada tahun 2012, bhikku menjadi pemimpin dalam memprotes tindakan perlindungan hutan setelah banyak dari lahan-lahan hutan dikuasi oleh swasta. Saat terjadi demonstrasi akibat adanya kecurigaan ketidakpatuhan dalam pemilu pada tahun 2013, para bhikku bergerak bersama masyarakat dan menuntut para aparat penegak hukum untuk menghilangkan pagar pembatas. Para bhikku menjelaskan bahwa mereka mendapatkan makanan dan dukungan dari rakyat sehingga sudah menjadi kewajiban mereka untuk berjuang bersama dengan rakyat (GlobalPost, 2013). Pada tahun 2013, Bun Buntenh, seorang tokoh bhikku di Kamboja memimpin 40 bhikku dalam melakukan perjalanan sepanjang 25 km sebagai bentuk protes atas pembangunan bendungan oleh sebuah perusahaan Cina (Kent, 2024). Melihat bagaimana para bhikku semakin berani dalam menyuarakan suaranya, pemerintah Kamboja berusaha melakukan represi dengan membuat sebuah undang-undang yang mengatur tingkah laku para bhikku. Banyak bhikku yang aktif sebagai aktivis melakukan pelarian diri ke Amerika Serikat, Thailand, atau Vietnam guna menghindari penangkapan. Beberapa negara, seperti Swiss memberikan asylum kepada para bhikku guna melindungi mereka dari tekanan politik pemerintah Kamboja (Dara, 2022).

Analisis Komparatif Gerakan Nasionalisme Buddhis di Myanmar, Thailand, dan Kamboja

Analisis komparatif gerakan nasionalisme Buddhisme di ketiga negara dapat dibahas melalui beberapa sudut pandang, mengingat ketiga negara memiliki dinamika sosial-politik yang berbeda dan dampaknya yang beragam kepada masyarakat.

Melalui konteks historis, ketiga negara memiliki perbedaan yang signifikan mengenai kemunculan konsep nasionalisme Buddhisme. Di Myanmar, nasionalisme buddhisme berkembang pesat sejak masa kolonialisme Inggris. Kemunculan semangat nasionalisme ini juga diikuti oleh berkembangnya sentiment anti-Muslim yang kuat, khususnya sejak krisis Rohingnya mulai meluas. Identitas nasional Myanmar sangat mengakar pada etnis dan agama, sehingga kelompok minoritas seperti muslim di Negara Bagian Rakhine sering menjadi sasaran ekslusi dan kekerasan. Gerakan 969 dan Ma Ba Tha menjadi penggerak utama dalam penyebarluasan sentiment ini. Di Thailand, nasionalisme Buddhisme berkembang di bawah perlindungan kerajaan, dimana raja berposisi sebagai pelindung utama sangha. Tiga pilar, yaitu agama, negara, dan raja menjadi fondasi utama dalam membentuk identitas nasional Thailand. Namun, beberapa waktu belakangan, kelompok ekstrimis mulai menciptakan gejolak dengan menekan pemerintah untuk memperkuat posisi agama dalam konstitusi dan kehidupan public. Berbeda dengan dua negara sebelumnya, nasionalisme Buddhis di Kamboja merupakan bentuk reaksi atas trauma masa lalu di era Khmer Merah. Walau Kamboja menetapkan Buddhisme sebagai agama nasional, nasionalisme Buddhis di Kamboja lebih menekankan pada aspek kultural dan simbolik, bukan diskriminasi.

Dalam konteks relasi agama dan negara, ketiganya juga menunjukkan perbedaan yang cukup tegas. Di Myanmar, nasionalisme Buddhis bertransformasi dari sebuah ajaran agama menjadi identitas etnis dan budaya yang membentuk identitas bangsa mereka sendiri. Ajaran Buddhisme menjadi bagian tak terpisahkan dari gerakan nasionalisme Burma, khususnya di era kolonialisme Inggris. Di era kontemporer, nasionalisme Buddhis berubah menjadi sebuah alat politik, khususnya oleh junta militer dan grup nasionalis sayap kanan jauh. Pemerintahan Junta melabeli diri mereka sebagai pelindung agama Buddha guna melegitimasi posisi dan apa yang mereka lakukan, sehingga diskriminasi yang mereka lakukan pun tidak mendapatkan konfrontasi berarti, khususnya berkaitan dengan aktivitas mereka terhadap etnis Rohingnya. Mereka juga dibantu oleh kelompok Sangha yang menjadi penyeter utama sentimen publik.

Thailand menunjukkan hubungan yang lebih erat antara institusi monarki dengan sangha, mengingat monarki dianggap sebagai pelindung dari

agama dan para bhikku. Buddhisme menjadi instrument legitimasi kekausaan politik dan posisi nasionalisme Buddhis di Thailand juga semakin kuat disaat terjadi konflik dan krisis politik. Meski demikian, nasionalisme Buddhis di Thailand lebih bersifat integratif, namun tetap menekan minoritas untuk menyesuaikan diri dengan norma mayoritas. Nasionalisme Buddha di Thailand terkait erat dengan pilar identitas tradisional negara tersebut: Bangsa, Agama (Buddhisme), dan Monarki. Agama Buddha tidak hanya dipandang sebagai agama, tetapi juga sebagai elemen inti identitas nasional dan harmoni sosial Thailand. Nasionalisme Buddha di Thailand telah mengalami kebangkitan dalam beberapa tahun terakhir, sebagian didorong oleh kaum konservatif politik yang mencari legitimasi di tengah tantangan demokrasi. Gerakan ini menekankan agama Buddha sebagai pusat identitas Thailand dan seringkali menekan pemerintah untuk memperkuat hubungan antara agama Buddha dan negara. Gerakan ini juga cenderung meminggirkan minoritas agama dan umat Buddha non-arus utama. Konflik, seperti di provinsi-provinsi selatan di mana pemberontak Muslim menantang dominasi agama Buddha, menyoroti keterkaitan antara agama dan nasionalisme.

Buddhisme di Kamboja menjadi bagian dari identitas nasional dan diperkuat melalui konstitusi, walau relasi antara sangha dengan negara lebih bersifat simbolik dan tidak menjadi sebuah alat legitimasi kekuasaan, baik bagi monarki maupun pemerintahan publik. Kamboja relatif lebih inklusif, meskipun tetap ada tantangan dalam hubungan antar kelompok etnis dan agama. Keterlibatan biarawan dalam politik, seperti partisipasi dalam pemilu, juga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Agama Buddha membentuk nilai-nilai, tradisi, dan identitas nasional Kamboja. Agama Buddha merupakan bagian dari semboyan nasional, "Bangsa, Agama, Raja," yang menekankan pentingnya simbolis dan kelembagaannya. Komunitas monastik Buddha (Sangha) memainkan peran penting dalam pendidikan, budaya, dan kohesi sosial, yang semakin memperkuat hubungan agama Buddha dengan identitas nasional. Meskipun menghadapi tantangan berat selama periode Khmer Merah ketika agama Buddha ditekan dan para pemimpin agama dianiaya, agama Buddha telah mengalami kebangkitan yang signifikan sejak saat itu. Negara secara aktif mendukung lembaga-lembaga Buddha, dan perayaan serta praktik Buddha tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-

hari. Di Kamboja, agama Buddha bukan hanya sebuah agama, tetapi juga kerangka

Dalam konteks multikultural, nasionalisme Buddhis sangat mempengaruhi bagaimana ketiga negara membentuk identitas multikultural mereka yang kompleks dan dipenuhi dengan intrik historis, politik, dan gejolak sosial. Di Myanmar, nasionalisme Buddhis berkembang sebagai sebuah bagian dari gerakan sosial yang semakin menguat sejak transisi politik di tahun 2011. Berkembangnya nasionalisme Buddhis di Myanmar dipengaruhi oleh gerakan Ma Ba Tha (Zhang, 2019). Sementara itu, ancaman politik dan ketegangan etnis yang dirasakan telah memicu munculnya sentimen nasionalis di kalangan umat Buddha. Gerakan nasionalis sering mendefinisikan identitas etnis Burma dalam istilah agama, memposisikan Buddhisme Theravada sebagai penanda batas spiritual dan etnis. Hal ini telah meminggirkan minoritas agama, terutama Muslim Rohingya, yang mengarah pada kebijakan yang eksklusif dan terkadang kekerasan terhadap komunitas non-Buddha. Penggabungan agama dan etnis ini merusak komposisi multietnis dan multiagama Myanmar dengan memprioritaskan identitas tunggal Buddha-Burma dan mengecualikan yang lain. Dinamika ini telah meningkatkan kekerasan antarkomunitas, fragmentasi sosial, dan krisis persatuan nasional dalam masyarakat yang beragam dengan lebih dari 100 kelompok etnis.

Di Thailand, peran politik dan budaya Buddhisme berakar pada hubungan simbiotiknya dengan monarki dan negara, yang terwujud dalam triad nasional "*Bangsa, Agama, Raja*." Berbeda dengan Myanmar, di mana nasionalisme agama kerap bersifat eksklusif terhadap kelompok minoritas, nasionalisme Buddhis di Thailand secara historis lebih menekankan pada kohesi sosial dan persatuan nasional (Keyes, 2017). Namun demikian, kekhawatiran muncul sebagai reaksi atas lahirnya wacana nasionalisme Buddhis yang lebih asertif sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik kontemporer serta ancaman yang dipersepsikan terhadap identitas Thailand, khususnya yang bersumber dari populasi minoritas Muslim di provinsi-provinsi selatan. Bentuk nasionalisme ini menempatkan Buddhisme sebagai elemen utama dalam pembentukan identitas sekaligus tatanan moral bangsa Thailand, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi monarki dan struktur hierarkis masyarakat. Meskipun lebih bersifat integratif dibandingkan nasionalisme Buddhis di Myanmar, Thailand tetap menghadapi tantangan

dalam konteks multikulturalisme, terutama di kawasan perbatasan selatan yang masih dilanda konflik etnoreligius. Dalam kerangka tersebut, nasionalisme Buddhis berfungsi memperkuat narasi budaya dominan, tetapi sekaligus memarginalkan kelompok minoritas agama, sehingga memperlihatkan ketegangan antara gagasan persatuan nasional dengan cita-cita inklusi multikultural yang sejati.

Kamboja menghadirkan gambaran yang agak berbeda. Buddhisme merupakan agama negara dan dianut hampir secara universal oleh penduduknya, sehingga menciptakan tingkat pluralisme keagamaan yang lebih rendah dibandingkan Myanmar maupun Thailand. Tradisi Buddhisme Theravāda, yang sempat terguncang hebat akibat rezim Khmer Merah, kini berfungsi sebagai pilar utama identitas nasional sekaligus sebagai fondasi pemulihan pascakonflik (Ledgerwood, 2007). Buddhisme berperan sebagai kekuatan pemersatu baik secara kultural maupun moral, yang terjalin erat dengan identitas etnis Khmer. Perannya melampaui ranah keagamaan, mencakup bidang pendidikan, praktik sosial, hingga warisan kebudayaan nasional. Minimnya kehadiran kelompok minoritas keagamaan menjadikan nasionalisme Buddhis di Kamboja lebih berorientasi pada pelestarian budaya dan penguatan kohesi nasional, daripada sikap eksklusif atau penyingkiran kelompok lain (Chandler, 2017). Berbeda dengan Myanmar, nasionalisme Buddhis di Kamboja umumnya tidak menjadi pemicu konflik antaragama. Namun demikian, sebagai kekuatan budaya dominan, nasionalisme ini secara tidak langsung berpotensi membatasi ekspresi identitas kelompok minoritas dalam masyarakat multikultural, khususnya di kalangan masyarakat adat maupun kelompok non-Buddhis.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji fenomena Buddhist-nationalism sebagai paradoks dalam multikulturalisme di Myanmar, Thailand, dan Kamboja, dengan temuan bahwa nasionalisme Buddhisme berkembang dalam konteks historis yang berbeda di ketiga negara. Di Myanmar, gerakan nasionalis Buddhisme seperti 969 dan Ma Ba Tha muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme Inggris, memicu sentimen anti-Muslim dan diskriminasi sistematis. Thailand mengintegrasikan Buddhisme dengan monarki dan identitas nasional sejak era Raja Mongkut, menjadikannya alat

legitimasi politik, meskipun belakangan muncul kelompok ekstremis yang menekan minoritas. Sementara itu, di Kamboja, Buddhisme berperan sebagai pemersatu pasca-trauma Khmer Merah, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan simbolis. Relasi agama-negara di Myanmar dan Thailand cenderung eksklusif, mengorbankan hak minoritas, sedangkan di Kamboja lebih berfokus pada rekonsiliasi. Paradoks muncul ketika ajaran Buddha yang damai justru digunakan untuk membenarkan kekerasan di Myanmar dan Thailand, sementara di Kamboja, Buddhisme menjadi landasan pemulihan sosial. Secara keseluruhan, nasionalisme Buddhisme dapat menjadi kekuatan pemersatu atau pemecah belah, tergantung pada konteks politik dan sosial, dengan tantangan utama adalah menyeimbangkan identitas nasional dan penghormatan terhadap keragaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, R. (2015). Buddhism. In Athyal, J.M (ed). *Religions in Southeast Asia: An Encyclopaedia of Faiths and Cultures*. Santa Barbara: ABC-CLIO. 22-26.
- Agustien, Resi. (2023). Studi Komparasi Hasil Pembelajaran Luring dan Pembelajaran Daring pada Mata Kuliah Bahasa Arab. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, Vol.3, No.1. <http://dx.doi.org/10.30659/jp-sa.v3i1.26747>.
- Ashley, David. (1998). Between War and Peace: Cambodia 1991-1998. In The Khmer Institute of Democracy, *Safeguarding Peace: Cambodia's Constitutional Challenge*.
- Chappus, Eva and Nourse, Benjamin. (2023). Buddhist Nationalism: Rising Religious Violence in South Asia. *DU Undergraduate Research Journal Archive*: Vol. 4: Iss. 2, Article 1.
- Charles Keyes. (2016). Theravada Buddhism and Buddhist Nationalism: Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, and Thailand. *The Review of Faith & International Affairs*, 14:4, 41-52, DOI: 10.1080/15570274.2016.1248497.
- Chandler, D. (2017). *A history of Cambodia* (4th ed.). Westview Press.
- Dara, M. (2022, January 11). Legacy of resistance being erased with new law, say activist monks'. Voice of Democracy. <https://vodenglish.news/legacy-of-resistancebeing-erased-with-new-law-say-activist-monks/>
- Dubus, Arnaud. (2017). *Buddhism and Politics in Thailand*. Bangkok: IRASEC.
- Dubus, Arnaud. (2018). "Buddhism and Nationalism" Buddhism and Politics in Thailand. *Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine*, <https://doi.org/10.4000/books.irasec.2988>.
- Easum, Taylor M. (2013). A Thorn in Bangkok's Side: Kruba Sriwichai, Sacred Space and the Last Stand of the Pre-Modern Chiang Mai State. *South East Asia Research*, 211–36.
- Gupta, Rajnessh Kumar & Verma, Alok Kumar. (2021). The Spread of Buddhism and Peace in Southeast Asia. *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage*, 10(2), 2021, 220-247.
- GlobalPost. (2013, October 8). In Cambodia, monks get political after unpopular elections. The World. <https://theworld.org/stories/2013-10-08/cambodia-monksget-political-after-unpopular-elections>.
- Houtart, Francois. (1976). Buddhism and Politics in South-East Asia: Part One. *Social Scientist*, Vol. 5, No. 3 (Oct., 1976), pp. 3-23.
- International Crisis Group. (2017). Report Part Title: Buddhist Nationalism in Myanmar and the Region. International Crisis Group. <https://www.jstor.org/stable/resrep31446.5>.
- Jha, G.K. (2016). Indonesian Cultural System and Undercurrent. *Heritage of Nusantara-Indonesian Journal of Religious Literature and Heritage*, 5(2), 212-29.
- Jory, Patrick. (2002). Thai and Western Buddhist Scholarship in the Age of Colonialism: King Chulalongkorn Redefines the Jatakas. *The Journal of Asian Studies*, 1–28.
- Kent, Alexandra. (2024). Khmer Buddhism and the Moderation of Political Power in Cambodia. In G. Facal, E.L de Micheaux, & A.N Nilsson, *The Palgrave Handbook of Political Norms in Southeast Asia*.

- Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1007/978-981-99-9655-1>.
- Keyes, Charles F. (2016). Theravada Buddhism, and Buddhist Nationalism: Sri Lanka, Myanmar, Cambodia, and Thailand. *The Review of Faith and International Affairs*, 42–52.
- Keyes, C. F. (2022). Communist revolution and the Buddhist past in Cambodia. In C. F. Keyes & H. Hardacre (Eds.), *Asian visions of authority: Religion and the modern states of East and Southeast Asia* (pp. 43–74). University of Hawaii Press.
- Ledgerwood, J. (2007). Cambodian Buddhism: History and practice. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, 8(1), 85–100.
<https://doi.org/10.1080/14442210601177913>.
- McCargo, Duncan. (2009). The Politics of Buddhist Identity in Thailand's Deep South: The Demise of Civil Religion. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 40, No. 1.
<https://www.jstor.org/stable/27751550>.
- Niklas Foxeus. (2019). The Buddha was a devoted nationalist: Buddhist nationalism, resentment, and defending Buddhism in Myanmar. *Religion*. DOI: 10.1080/0048721X.2019.1610810.
- Marshall, A. (2011, April 11). The slow thaw of Burma's notorious military junta. *Times*. Archived from the original on September 1, 2011. Diakses pada 24 Mei, 2025.
- Min Zin. (2015). Anti-Muslim Violence in Burma: Why Now?. *Social Research* 82 (2): 373–396.
- Steinberg, D. I. (1997, December 4–5). *A void in Myanmar: Civil society in Burma* [Conference presentation]. Strengthening Civil Society in Burma Conference, Transnational Institute and Burma Centrum Nederland, Amsterdam, The Netherlands.
- Tonsakulrungruang, Khemthong. (2021). The Revival of Buddhist Nationalism in Thailand and Its Adverse Impact on Religious Freedom. *Asian Journal of Law and Society*, 1-16.
 doi:10.1017/als.2020.48.
- Urgensi Penggunaan Politik Identitas Terhadap Perilaku Pemilih Pada Pilihan Presiden 2024 Yang Demokratis.
- (2023). *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 297-316. <https://doi.org/10.55292/4jqr6d29>.
- Zhang, L. (2019). *Buddhist nationalism as social movement in political transition: MaBaTha movement in Myanmar*. David Publishing.